

Submitted: 2025-02-21

Reviewed: 2025-03-20

Accepted: 2025-03-25

## Strategi Integratif Teologi Sosial, Perdamaian, dan Kearifan Lokal dalam Membangun Harmoni Sosial di Indonesia

Amirrudin Zalukhu<sup>1\*</sup>

Sekolah Tinggi Teologi Cipanas<sup>1</sup>

\*) Email: rudizalukhu408@gmail.com

### ABSTRACT

Indonesia, as a multicultural nation, faces challenges in maintaining social harmony amidst ethnic, religious, and cultural diversity. This study examines an integrative strategy combining social theology, peacebuilding, and local wisdom as a holistic approach to fostering harmonious living. Using a qualitative approach through literature review and case studies, this research analyzes the role of social conflict theory, functionalism, symbolic interactionism, reconciliation theory, and the concept of Christ the Transformer of Culture in formulating a theology-based social strategy. The findings reveal that local wisdom, such as Martarombo in Batak culture, contains peace values aligned with social theology in fostering just and harmonious relationships. Social hermeneutics and thematic analysis are employed to explore the interconnection between cultural and theological values in reconciliation and social integration. This study concludes that social harmony can be achieved through the synergy of religion and culture as a sustainable peace strategy in Indonesia.

**Keywords:** Social Theology; Local Wisdom; Social Harmony; Reconciliation; Peace Building

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan dalam merawat harmoni sosial di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Penelitian ini mengkaji strategi integratif teologi sosial, perdamaian, dan kearifan lokal sebagai pendekatan holistik dalam membangun kehidupan yang harmonis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi kasus, penelitian ini menganalisis peran teori konflik sosial, fungsionalisme, interaksi simbolik, rekonsiliasi, serta konsep *Christ the Transformer of Culture* dalam merumuskan strategi sosial berbasis teologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti *Martarombo* dalam budaya Batak, memiliki nilai-nilai perdamaian yang selaras dengan ajaran teologi sosial dalam membangun relasi yang adil dan harmonis. Pendekatan hermeneutika sosial dan analisis tematik digunakan untuk memahami keterkaitan antara nilai-nilai budaya dan teologi dalam proses rekonsiliasi dan integrasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa harmoni sosial dapat terwujud melalui perpaduan antara agama dan budaya sebagai strategi keberlanjutan perdamaian di Indonesia.

**Kata-kata kunci:** Teologi Sosial; Kearifan Lokal; Harmoni Sosial; Rekonsiliasi; Perdamaian

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa yang sangat kaya. Keberagaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam kehidupan sosial (H.A.R., 2000). Harmoni sosial sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam menghadapi potensi konflik akibat perbedaan. Sejarah menunjukkan bahwa ketidakharmonisan dapat memicu ketegangan sosial yang berujung pada konflik

berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya membangun dan merawat harmoni sosial perlu terus dilakukan melalui pendidikan, dialog antarbudaya, serta penguatan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, harmoni sosial berperan penting dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan (Fathurrohman, 2023). Kehidupan sosial yang harmonis mendorong kerja sama antarindividu dan kelompok dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan pendidikan. Ketika masyarakat hidup dalam suasana yang rukun, peluang untuk berkembang bersama menjadi lebih besar. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ini dengan menanamkan sikap toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan demikian, harmoni sosial menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

Masyarakat multikultural dan multireligius memiliki kompleksitas hubungan sosial yang tinggi karena keberagaman keyakinan, nilai, dan budaya (Pangalila & Rumbay, 2024). Perbedaan ini sering kali menjadi tantangan dalam menjaga harmoni sosial, terutama ketika tidak diimbangi dengan sikap saling menghormati dan toleransi. Konflik dapat muncul akibat perbedaan cara pandang terhadap norma sosial, adat, maupun keyakinan keagamaan. Ketegangan sosial sering terjadi ketika kelompok tertentu merasa nilai-nilai mereka terancam atau tidak dihargai oleh kelompok lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus dalam membangun dialog antarbudaya dan antaragama agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan sebagai kekayaan sosial yang memperkaya kehidupan bersama.

Selain perbedaan nilai dan keyakinan, kompleksitas hubungan sosial diperburuk oleh adanya stereotip, prasangka, dan diskriminasi yang masih mengakar di tengah masyarakat (Dewantara et al., 2024). Stereotip yang berlebihan dapat menciptakan stigma negatif terhadap kelompok tertentu, yang pada akhirnya memperlemah solidaritas sosial. Prasangka sosial, baik yang berbasis suku, agama, maupun latar belakang ekonomi, sering kali menghambat interaksi yang sehat antarindividu dan kelompok. Diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi, dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin memperdalam jurang perpecahan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk membangun sikap inklusif dan menghapus diskriminasi agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara adil dan harmonis.

Di sisi lain, globalisasi dan modernisasi membawa pengaruh yang kompleks terhadap dinamika sosial masyarakat multikultural dan multireligius (Kolibu, 2023). Perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat dapat menjadi jembatan dalam mempererat hubungan sosial, tetapi memicu disinformasi dan perpecahan. Modernisasi membuka peluang

bagi masyarakat untuk lebih terbuka terhadap budaya dan pemikiran baru, namun berisiko mengikis nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi perekat sosial. Selain itu, persaingan ekonomi yang semakin ketat akibat globalisasi dapat memperkuat kesenjangan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat perlu memiliki kesadaran kritis dan sikap selektif dalam menyikapi perubahan agar tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai sosial yang telah diwariskan.

Beberapa penelitian telah membahas hubungan antara teologi sosial, perdamaian, dan kearifan lokal dalam membangun harmoni sosial di Indonesia. Irfan (2020) menyoroti bagaimana pluralisme agama dan dialog antar umat beragama di Indonesia dapat menjadi fondasi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, Hamid et al. (2024) mengkaji peran kearifan lokal dalam masyarakat Batak dalam membangun harmoni sosial, dengan menekankan konsep *dalihan na tolu* sebagai model relasi sosial yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks multikultural. Di sisi lain, Bakri (2015) menyoroti pendekatan integratif dalam resolusi konflik berbasis kearifan lokal, namun kurang membahas peran teologi sosial dalam mendukung transformasi sosial yang lebih luas.

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait, masih terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diisi. Sebagian besar studi cenderung berfokus pada satu aspek tertentu, seperti teologi sosial atau kearifan lokal, tanpa mengembangkan strategi integratif yang menyatukan keduanya secara sistematis. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengelaborasi bagaimana strategi integratif ini dapat diimplementasikan dalam konteks sosial yang lebih luas dan beragam di Indonesia. Oleh karena itu, novelty dari penelitian ini adalah mengembangkan model strategi integratif yang menghubungkan teologi sosial, perdamaian, dan kearifan lokal secara holistik untuk membangun harmoni sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan strategi integratif yang menghubungkan teologi sosial, nilai-nilai perdamaian, dan kearifan lokal dalam membangun harmoni sosial di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis bagaimana ketiga elemen tersebut berinteraksi dalam berbagai komunitas, mengidentifikasi praktik terbaik yang telah diterapkan, serta mengevaluasi efektivitas pendekatan integratif dalam mengatasi konflik dan memperkuat kohesi sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model strategis yang dapat menjadi panduan bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, dalam mengimplementasikan solusi berbasis teologi sosial dan kearifan lokal guna menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan harmonis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan studi kasus untuk mengeksplorasi strategi integratif antara teologi sosial, nilai-nilai perdamaian, dan kearifan lokal dalam membangun harmoni sosial di Indonesia. Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis berbagai literatur terkait teologi sosial, teori konflik, fungsionalisme, interaksi simbolik, serta rekonsiliasi, guna memahami konsep-konsep yang relevan dalam membentuk strategi integratif. Sementara itu, studi kasus dilakukan dengan menelaah komunitas atau wilayah di Indonesia yang telah menerapkan pendekatan berbasis teologi sosial dan kearifan lokal dalam menjaga kohesi sosial. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, laporan komunitas, serta wawancara sekunder yang tersedia, sehingga memungkinkan pemahaman mendalam terhadap praktik nyata di masyarakat.

Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu hermeneutika sosial dan analisis tematik. Hermeneutika sosial digunakan untuk menafsirkan hubungan antara ajaran teologis dan praktik sosial dalam membangun harmoni serta menyelami makna nilai-nilai keagamaan dalam konteks sosial yang lebih luas (I. Al Munir, 2021). Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antara agama, budaya, dan strategi perdamaian yang telah diterapkan dalam berbagai komunitas. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan model strategi integratif yang dapat diterapkan secara luas dalam membangun kehidupan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Teoritis dan Teologis**

Landasan teoritis dan teologis menjadi pijakan penting dalam memahami peran agama dan nilai-nilai sosial dalam membangun harmoni di tengah masyarakat yang beragam. Secara teoritis, konsep keadilan sosial, solidaritas, dan kearifan lokal menjadi dasar dalam menganalisis dinamika sosial serta strategi dalam menciptakan perdamaian. Sementara itu, secara teologis, ajaran agama memberikan kerangka etis dan moral yang menuntun umat dalam mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan berkeadaban.

### ***Landasan Teoritis***

Teori konflik sosial, yang dikembangkan oleh Karl Marx, menjelaskan bahwa struktur sosial dalam masyarakat sering kali menghasilkan ketegangan dan konflik akibat ketimpangan

dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya (Rinawati, 2016). Dalam perspektif ini, masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, seperti kelas sosial dalam sistem ekonomi kapitalis. Marx menekankan bahwa konflik sosial merupakan bagian alami dari dinamika masyarakat dan sering kali menjadi pendorong perubahan sosial. Dalam konteks harmoni sosial, teori ini membantu memahami akar permasalahan ketimpangan yang dapat memicu ketidakstabilan, sehingga solusi yang adil dapat dirumuskan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Teori fungsionalisme, yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, menekankan bahwa masyarakat dapat mencapai harmoni jika setiap elemen sosial menjalankan perannya secara seimbang dan saling melengkapi (Prasetya et al., 2021). Dalam pandangan ini, setiap individu dan institusi memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Misalnya, keluarga berperan dalam sosialisasi nilai-nilai, agama memberikan panduan moral, dan sistem hukum menjaga ketertiban. Ketika semua elemen ini bekerja secara harmonis, masyarakat akan lebih stabil dan mampu mengatasi berbagai tantangan sosial. Teori ini memberikan dasar bagi upaya membangun harmoni sosial dengan memastikan bahwa setiap komponen masyarakat memiliki peran yang jelas dan berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Teori interaksi simbolik, yang dikembangkan oleh Herbert Blumer dan George Herbert Mead, menyoroti bagaimana makna dan simbol dalam interaksi sosial dapat memengaruhi hubungan antarindividu dan kelompok (Noiman Derung, 2017). Dalam masyarakat multikultural dan multireligius, perbedaan makna yang diberikan pada simbol-simbol tertentu dapat menjadi pemicu konflik atau, sebaliknya, menjadi jembatan untuk memperlerat hubungan sosial. Misalnya, penggunaan bahasa, gestur, atau simbol keagamaan dapat memiliki interpretasi yang berbeda di setiap kelompok. Dengan memahami teori ini, pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan dialog yang lebih terbuka dapat diterapkan untuk membangun pemahaman yang lebih baik antaranggota masyarakat, sehingga memperkuat harmoni sosial.

Teori rekonsiliasi berfokus pada strategi dan pendekatan dalam merajut kembali hubungan sosial yang retak akibat konflik (Yuli & Pramudiani, 2020). Pendekatan ini melibatkan berbagai metode, seperti dialog lintas kelompok, mediasi, dan pemulihan kepercayaan melalui kerja sama sosial. Dalam banyak kasus, rekonsiliasi melibatkan upaya keadilan restoratif, di mana pihak yang berkonflik diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan. Teori ini memberikan kerangka kerja bagi berbagai inisiatif perdamaian yang bertujuan untuk menyembuhkan luka

sosial dan membangun kembali hubungan yang lebih kuat berdasarkan kepercayaan dan saling pengertian.

Emile Durkheim (1918), seorang sosiolog klasik, mengembangkan teori sosial yang menekankan pentingnya solidaritas dalam menjaga keteraturan masyarakat. Ia membedakan dua jenis solidaritas: solidaritas mekanik, yang ditemukan dalam masyarakat tradisional di mana individu memiliki kesamaan nilai, norma, dan pekerjaan; serta solidaritas organik, yang muncul dalam masyarakat modern dengan pembagian kerja yang kompleks, di mana individu saling bergantung satu sama lain meskipun memiliki perbedaan peran dan spesialisasi. Durkheim juga memperkenalkan konsep kesadaran kolektif, yaitu seperangkat keyakinan dan norma bersama yang mengikat individu dalam suatu komunitas. Selain itu, ia mengkaji fenomena anomie, yaitu keadaan di mana norma sosial melemah akibat perubahan sosial yang cepat, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan disorientasi moral dalam masyarakat. Melalui pendekatan fungsionalismenya, Durkheim menegaskan bahwa setiap elemen sosial, termasuk institusi agama, hukum, dan pendidikan, memiliki fungsi penting dalam mempertahankan integrasi dan harmoni sosial (Harahap et al., 2023).

Kelima teori sosial—konflik sosial, fungsionalisme, interaksi simbolik, rekonsiliasi, dan teori sosial Emile Durkheim—memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami dinamika sosial dan strategi membangun harmoni di masyarakat. Teori konflik sosial menyoroti ketegangan dan perjuangan antara kelompok akibat distribusi sumber daya dan kekuasaan yang tidak merata, mendorong perubahan sosial melalui resistensi terhadap ketidakadilan. Sebaliknya, teori fungsionalisme menekankan pentingnya stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat, dengan setiap elemen sosial memainkan peran spesifik yang mendukung keteraturan. Teori interaksi simbolik berfokus pada makna sosial yang dikonstruksi melalui interaksi individu, mengungkap bagaimana simbol dan komunikasi membentuk realitas sosial serta identitas kelompok. Teori rekonsiliasi berperan dalam membangun kembali hubungan sosial yang retak akibat konflik, menekankan dialog, pengampunan, dan transformasi sosial untuk menciptakan harmoni yang berkelanjutan. Teori sosial Emile Durkheim menjelaskan bagaimana solidaritas dalam masyarakat berkembang dari solidaritas mekanik, di mana kesamaan nilai menjadi perekat sosial, menuju solidaritas organik, di mana masyarakat modern bergantung pada spesialisasi dan interdependensi. Konsep kesadaran kolektif menegaskan bahwa norma dan nilai bersama menjadi fondasi keteraturan sosial, sementara fenomena anomie menunjukkan risiko ketidakstabilan ketika norma tradisional melemah akibat perubahan sosial yang cepat.

Meskipun kelima teori ini memiliki perbedaan pendekatan, ada kesamaan yang memungkinkan mereka untuk saling melengkapi dalam analisis sosial. Teori konflik sosial dan rekonsiliasi, misalnya, dapat dipadukan dalam pemahaman bahwa konflik adalah bagian dari dinamika sosial yang membutuhkan resolusi melalui mekanisme rekonsiliasi untuk membangun harmoni yang lebih adil. Teori fungsionalisme dan teori Durkheim memiliki kesamaan dalam melihat masyarakat sebagai sistem yang harus tetap seimbang, dengan norma dan solidaritas sebagai elemen utama dalam menjaga keteraturan sosial. Interaksi simbolik dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai teori ini, karena makna sosial yang dikonstruksi melalui interaksi individu dapat memperkuat kohesi sosial (dalam perspektif fungsionalisme dan Durkheim), sekaligus mencerminkan dinamika kekuasaan yang dianalisis dalam teori konflik. Namun, ada beberapa aspek yang membuat teori-teori ini sulit untuk sepenuhnya disatukan. Teori konflik sosial dan fungsionalisme memiliki kontradiksi mendasar, di mana konflik sosial menekankan ketimpangan dan perubahan struktural, sedangkan fungsionalisme menekankan stabilitas dan keteraturan. Teori interaksi simbolik, yang berfokus pada level mikro, terkadang sulit dikombinasikan dengan teori konflik sosial, yang lebih melihat realitas sosial dari perspektif makro dan struktural. Teori rekonsiliasi, yang menekankan pemulihan hubungan sosial melalui pendekatan normatif, juga bisa berbenturan dengan teori konflik, yang melihat perjuangan kepentingan sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak selalu bisa didamaikan dengan mudah. Selain itu, konsep anomie dari Durkheim, yang menggambarkan ketidakstabilan akibat perubahan sosial yang cepat, dapat berbenturan dengan asumsi rekonsiliasi yang mengandaikan bahwa harmoni dapat dipulihkan dengan mekanisme sosial tertentu. Oleh karena itu, sementara teori-teori ini dapat saling melengkapi dalam beberapa aspek, tantangan utama dalam mengintegrasikannya adalah menemukan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan, antara faktor struktural dan relasional, serta antara ketegangan sosial dan upaya membangun harmoni yang berkelanjutan.

### ***Landasan Teologis***

Ajaran kasih dalam agama Kristen merupakan prinsip fundamental yang menuntun umat dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Konsep kasih (*agape*) dalam ajaran Yesus Kristus mengajarkan cinta tanpa syarat yang harus diwujudkan dalam sikap saling mengasihi, bahkan terhadap musuh sekalipun. Dalam Matius 22:37-39, Yesus menegaskan bahwa kasih kepada Tuhan dan sesama manusia adalah hukum yang terutama dalam kehidupan. Ajaran ini menjadi dasar bagi etika sosial Kristen, di mana kasih bukan hanya sebagai perasaan, tetapi sebagai tindakan nyata dalam membantu sesama, mengampuni, dan memperjuangkan keadilan. Dengan memahami kasih sebagai fondasi dalam relasi sosial,

masyarakat Kristen didorong untuk berkontribusi dalam menciptakan harmoni di tengah perbedaan.

Keadilan sosial dalam perspektif teologi menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan dan perlakuan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ajaran Kristen, konsep keadilan sangat erat kaitannya dengan kehendak Tuhan yang menginginkan keseimbangan dalam relasi sosial. Kitab Yesaya 1:17 menegaskan pentingnya membela kaum tertindas, anak yatim, dan janda sebagai wujud konkret dari keadilan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Yesus yang sering berpihak pada kaum miskin dan tersisih dalam masyarakat. Dengan demikian, teologi keadilan sosial mendorong umat untuk aktif dalam membangun sistem sosial yang lebih adil dan inklusif, serta menolak segala bentuk penindasan dan ketidakadilan (Adag, 2024).

Doktrin perdamaian dalam ajaran Kristen menegaskan pentingnya hidup damai, toleransi, dan rekonsiliasi sebagai bagian dari panggilan iman. Yesus sendiri disebut sebagai "Raja Damai" (Yesaya 9:6) yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ada dalam perdamaian dan pengampunan. Dalam Matius 5:9, Yesus menyatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Prinsip ini mengajak umat Kristen untuk tidak hanya menghindari konflik, tetapi aktif dalam membangun jembatan perdamaian melalui dialog, kerja sama, dan pelayanan sosial. Perdamaian dalam perspektif teologis tidak sekadar ketiadaan konflik, tetapi hadirnya keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia (Edelfrida, 2024).

Peran pemimpin agama dalam membangun harmoni sosial sangatlah signifikan, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan rentan terhadap konflik. Para pemimpin Kristen, seperti pendeta dan uskup, memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan perdamaian kepada jemaat dan masyarakat luas. Dalam sejarah, banyak tokoh agama Kristen yang berperan dalam meredam konflik sosial, seperti Desmond Tutu (1999) di Afrika Selatan yang memperjuangkan rekonsiliasi pasca-apartheid, atau tokoh-tokoh gereja di Indonesia yang berperan dalam menjaga perdamaian seperti Andreas A. Yewangoe, Gomar Gultom, Franz Magnis-Suseno, dan tokoh-tokoh lainnya. Dengan pendekatan pastoral dan dialog lintas agama, para pemimpin Kristen dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan dan mendorong sikap saling memahami di tengah keberagaman.

Dengan menjadikan kasih, keadilan sosial, dan perdamaian sebagai landasan teologis, umat Kristen memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Ajaran agama tidak hanya bersifat spiritual, tetapi berimplikasi dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih adil dan damai. Para pemimpin agama berperan sebagai jembatan



dalam meredakan ketegangan dan membangun solidaritas di antara berbagai kelompok (Ali, 2017). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip teologis ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar harmoni sosial dapat terwujud secara berkelanjutan.

### **Konsep Dasar Teologi Sosial, Perdamaian, dan Kearifan Lokal**

#### ***Teologi Sosial***

Teologi sosial adalah cabang dari studi teologi yang menyoroti bagaimana nilai-nilai agama berperan dalam kehidupan sosial dan kesejahteraan bersama. Teologi ini menekankan bahwa ajaran agama tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual dan ibadah, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk membangun keadilan sosial, perdamaian, dan solidaritas antarumat manusia (Tonglo & Tiboyong, 2024). Dalam teologi sosial, agama dipandang sebagai kekuatan moral yang mampu menginspirasi perubahan sosial positif, seperti pengentasan kemiskinan, perlindungan hak asasi manusia, serta penciptaan hubungan harmonis di tengah perbedaan. Dengan demikian, teologi sosial berfungsi sebagai jembatan antara keyakinan keagamaan dan realitas kehidupan masyarakat, di mana nilai-nilai ketuhanan diterjemahkan dalam bentuk tindakan sosial yang konkret.

Selain teologi sosial, konsep perdamaian dan kearifan lokal menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Perdamaian bukan sekadar absennya konflik, tetapi mencakup upaya aktif dalam membangun kepercayaan, kerja sama, dan keadilan sosial di antara kelompok yang berbeda (Druckman & Wagner, 2019). Sementara itu, kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam banyak komunitas, kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan adat istiadat berperan dalam memperkuat kohesi sosial dan menciptakan solusi berbasis budaya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Dengan memahami dan mengaplikasikan ketiga konsep ini—teologi sosial, perdamaian, dan kearifan lokal—masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan.

Prinsip-prinsip teologi sosial, diantaranya prinsip keadilan sosial, prinsip solidaritas dan kasih, prinsip subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa. Prinsip keadilan sosial dalam teologi sosial menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan dan kesempatan dalam kehidupan bermasyarakat (Pardede et al., 2023). Prinsip ini bertujuan untuk menghapus ketimpangan sosial dengan memastikan bahwa sumber daya dan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Dalam konteks agama, keadilan sosial sering dikaitkan dengan tanggung jawab moral untuk membela kaum lemah, miskin, dan terpinggirkan. Oleh karena

itu, teologi sosial mendorong setiap individu dan institusi untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan merata, di mana tidak ada kelompok yang merasa ditinggalkan atau diperlakukan tidak setara.

Prinsip solidaritas dan kasih merupakan inti dari ajaran teologi sosial yang menekankan pentingnya rasa persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama. Solidaritas berarti bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan membantu, terutama yang sedang mengalami kesulitan (Dawir & Waani, 2024). Prinsip ini didasarkan pada ajaran kasih yang menekankan bahwa semua manusia adalah satu keluarga besar yang harus hidup dalam harmoni dan saling menjaga. Dalam praktiknya, solidaritas dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama sosial, dialog antaragama, serta berbagai tindakan filantropi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya solidaritas dan kasih, masyarakat dapat terhindar dari perpecahan dan lebih mudah membangun kehidupan yang damai dan penuh pengertian.

Prinsip subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa menegaskan bahwa setiap keputusan sosial dan politik harus dilakukan pada tingkat yang paling dekat dengan individu atau komunitas yang terdampak (Rapo, 2024). Prinsip ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks teologi sosial, subsidiaritas berarti bahwa kekuasaan yang lebih tinggi, seperti pemerintah pusat, tidak boleh mengambil alih peran yang dapat dilakukan oleh komunitas lokal atau individu, kecuali jika memang diperlukan untuk kebaikan bersama. Dengan menerapkan prinsip ini, masyarakat dapat lebih mandiri dan memiliki kontrol atas kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai, sehingga mendorong terciptanya keadilan dan keseimbangan sosial.

Ketiga prinsip ini—keadilan sosial, solidaritas dan kasih, serta subsidiaritas—saling berkaitan dalam membentuk dasar bagi teologi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Keadilan sosial memastikan bahwa hak dan kebutuhan setiap individu diakomodasi secara adil, solidaritas dan kasih memperkuat hubungan sosial melalui kepedulian terhadap sesama, sedangkan subsidiaritas menjamin bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sosial dan berbangsa, diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan berkeadaban, di mana setiap individu dihargai dan dapat berkontribusi dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik.

## ***Perdamaian***

Perdamaian adalah kondisi sosial yang bebas dari kekerasan dan konflik, di mana keadilan dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Perdamaian tidak hanya berarti ketiadaan perang atau pertikaian fisik, tetapi mencakup hadirnya rasa aman, keadilan sosial, dan hubungan harmonis antarindividu maupun kelompok (Bakri, 2015). Dalam konteks masyarakat multikultural dan multireligius, perdamaian menjadi aspek fundamental yang harus terus dijaga agar perbedaan tidak menjadi pemicu konflik, melainkan sebagai kekuatan dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya perdamaian harus dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai pendekatan yang menysasar akar permasalahan sosial.

Pendekatan rekonsiliatif merupakan salah satu strategi utama dalam membangun perdamaian, terutama dalam masyarakat yang pernah mengalami konflik atau ketegangan sosial (Bakri, 2015). Pendekatan ini berfokus pada membangun kembali hubungan yang retak melalui pertemuan dan dialog antara pihak-pihak yang berkonflik. Rekonsiliasi tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri permusuhan, tetapi untuk menciptakan pemahaman yang lebih dalam antara kelompok yang berbeda. Proses ini sering melibatkan mediasi dari pihak ketiga yang netral, baik dari tokoh agama, pemimpin komunitas, maupun organisasi perdamaian. Dengan membuka ruang untuk mendengar perspektif satu sama lain, rekonsiliasi dapat membantu menyembuhkan luka sosial dan memperkuat kembali kepercayaan di antara kelompok yang pernah berseteru.

Pendekatan struktural dalam membangun perdamaian berfokus pada pembentukan sistem sosial yang adil dan inklusif. Konflik sering kali muncul akibat ketimpangan ekonomi, sosial, atau politik yang menciptakan ketidakpuasan dalam masyarakat (Muhamad Zuldin, 2019). Oleh karena itu, membangun perdamaian memerlukan reformasi dalam berbagai aspek, seperti kebijakan publik, distribusi sumber daya yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Pemerintah dan institusi sosial harus memastikan bahwa setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, serta layanan dasar lainnya. Dengan menciptakan struktur sosial yang lebih adil, risiko konflik dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dengan kepercayaan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

Pendekatan budaya memiliki peran penting dalam membangun perdamaian, terutama dalam masyarakat yang kaya akan tradisi dan warisan lokal (Merina & Muhaimin, 2023). Seni, musik, tarian, serta adat istiadat dapat digunakan sebagai alat untuk mempererat hubungan sosial dan menciptakan pemahaman lintas budaya. Kearifan lokal yang diwariskan secara

turun-temurun sering kali mengandung nilai-nilai perdamaian, seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan memanfaatkan budaya sebagai sarana edukasi dan komunikasi, masyarakat dapat lebih mudah menerima perbedaan dan mengembangkan sikap toleransi. Festival budaya, pertunjukan seni, serta proyek komunitas berbasis budaya dapat menjadi media yang efektif dalam membangun perdamaian di tengah keberagaman.

Ketiga pendekatan ini—rekonsiliatif, struktural, dan budaya—harus diterapkan secara bersamaan agar upaya perdamaian dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan. Rekonsiliasi membantu menyembuhkan luka masa lalu, pendekatan struktural memastikan bahwa sistem sosial yang adil terbentuk, sementara pendekatan budaya memperkuat kohesi sosial melalui nilai-nilai lokal. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, di mana perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan sebagai fondasi untuk membangun kebersamaan yang lebih kuat. Perdamaian sejati hanya dapat terwujud ketika setiap individu dan kelompok memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga keseimbangan sosial demi masa depan yang lebih damai dan sejahtera.

### ***Kearifan Lokal***

Kearifan lokal merupakan pengetahuan, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas untuk menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Kearifan ini lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya, baik secara sosial, budaya, maupun ekologis. Dalam konteks kehidupan sosial, kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman dalam membangun hubungan harmonis antarindividu maupun kelompok. Nilai-nilai seperti kebersamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi bagian penting dari warisan budaya yang membantu menjaga stabilitas sosial. Di Indonesia, yang memiliki keberagaman etnis dan budaya, kearifan lokal memainkan peran sentral dalam menciptakan keharmonisan di tengah perbedaan.

Salah satu contoh nyata kearifan lokal dalam menjaga harmoni sosial adalah filosofi *gotong royong*, yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia (Noiman Derung, 2019). Gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, seperti pembangunan desa, kegiatan keagamaan, dan penyelesaian masalah komunitas. Nilai ini menekankan bahwa kesejahteraan bersama lebih utama daripada kepentingan individu, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk saling

membantu. Dengan adanya gotong royong, hubungan antarwarga menjadi lebih erat, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam budaya Batak, konsep *martarombo* menjadi salah satu sistem sosial berbasis kekerabatan yang sangat penting dalam menjaga hubungan harmonis. *Martarombo* adalah struktur sosial yang menghubungkan individu melalui garis keturunan, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki hubungan yang jelas satu sama lain (Sihombing et al., 2024). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai jaringan sosial, tetapi sebagai mekanisme dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat identitas kolektif. Dalam masyarakat Batak, hubungan kekerabatan dijaga dengan baik melalui berbagai upacara adat, musyawarah keluarga, serta tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap marga. Dengan adanya *martarombo*, nilai-nilai persaudaraan tetap terpelihara, bahkan dalam situasi yang penuh dengan perbedaan pendapat atau perselisihan.

Prinsip *musyawarah mufakat* dalam budaya Jawa merupakan contoh kearifan lokal yang mendukung harmoni sosial, terutama dalam penyelesaian konflik. Musyawarah mufakat adalah metode pengambilan keputusan yang menekankan dialog, kesabaran, dan keterlibatan semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama (Faradila & Dewi, 2023). Dalam budaya Jawa, konflik tidak diselesaikan secara konfrontatif, melainkan melalui proses diskusi yang panjang hingga ditemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk menghindari pertikaian yang berlarut-larut dan menjaga hubungan baik dalam komunitas. Dengan menerapkan prinsip musyawarah mufakat, masyarakat dapat membangun sistem sosial yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Ketiga contoh kearifan lokal tersebut—gotong royong, *martarombo*, dan musyawarah mufakat—menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dapat menjadi landasan dalam membangun dan merawat harmoni sosial di Indonesia. Meskipun masing-masing budaya memiliki cara tersendiri dalam mengelola hubungan sosial, prinsip dasar yang mendasarinya tetap sama, yaitu kebersamaan, penghormatan terhadap perbedaan, dan pencarian solusi yang adil. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, pelestarian serta penguatan kearifan lokal menjadi langkah penting agar harmoni sosial tetap terjaga. Dengan memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai budaya ini dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat terus hidup dalam kerukunan dan membangun masa depan yang lebih harmonis.

## **Peran dan Model Integratif Teologi Sosial, Perdamaian, dan Kearifan Lokal sebagai Solusi Keberlanjutan dalam Harmoni Sosial**

Teologi sosial memiliki peran penting dalam merawat kehidupan harmonis, terutama dalam konteks masyarakat yang multikultural dan multireligius (Sefen Krisman Gea, 2024a). Melalui perspektif teologis, teologi sosial membantu memahami isu-isu sosial, seperti ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, dan konflik antar kelompok, dengan pendekatan berbasis nilai-nilai spiritual (Heron & Ranganathan, 2022). Ajaran agama yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan solidaritas dapat menjadi landasan dalam membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis. Selain itu, teologi sosial juga berkontribusi dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik dengan mempertimbangkan dimensi etika dan moralitas yang melekat dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi menjadi motor penggerak dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan damai.

Perdamaian menjadi elemen kunci dalam menciptakan dialog yang konstruktif di tengah keberagaman masyarakat (McCandless, E., Hollander, R., Lordos, A., 2018a). Dalam konteks ini, perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi mencakup upaya aktif dalam membangun pemahaman dan kerja sama antar kelompok yang berbeda. Dialog lintas agama dan budaya menjadi salah satu cara efektif untuk meredam prasangka serta memperkuat rasa saling percaya. Selain itu, inisiatif-inisiatif berbasis komunitas, seperti forum perdamaian dan pendidikan toleransi, dapat memperkuat fondasi sosial yang lebih inklusif. Dengan menanamkan kesadaran bahwa setiap kelompok memiliki hak dan peran yang sama dalam masyarakat, perdamaian dapat menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni sosial.

Di samping teologi sosial dan perdamaian, kearifan lokal memiliki kontribusi besar dalam merawat kehidupan harmonis (Selasih & Sudarsana, 2018). Kearifan lokal mengacu pada nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan telah terbukti menjadi perekat sosial dalam masyarakat. Misalnya, dalam budaya Batak, konsep *martarombo* atau sistem kekerabatan berfungsi sebagai dasar dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa hormat terhadap sesama menjadi fondasi penting dalam membangun kebersamaan di tengah perbedaan. Dengan menggali dan memperkuat kearifan lokal, masyarakat dapat menemukan solusi berbasis budaya dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keseimbangan sosial.

Ketiga elemen ini—teologi sosial, perdamaian, dan kearifan lokal—saling melengkapi dalam membentuk masyarakat yang lebih harmonis. Teologi sosial memberikan landasan spiritual dan etis dalam memahami serta menyelesaikan persoalan sosial, sedangkan perdamaian menjadi alat utama dalam membangun dialog dan mencegah konflik. Sementara

itu, kearifan lokal berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat identitas dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini dalam kehidupan sosial, diharapkan masyarakat dapat terus berkembang dalam harmoni, saling menghormati, dan bekerja sama demi menciptakan kehidupan yang lebih damai dan berkeadilan.

Pendekatan integratif menjadi solusi keberlanjutan dalam membangun harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Mengingat kompleksitas permasalahan sosial yang sering kali melibatkan aspek agama, budaya, dan ekonomi, diperlukan strategi yang menggabungkan berbagai perspektif. Pendekatan multidisipliner yang mencakup teologi, sosiologi, dan antropologi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam merespons tantangan sosial. Teologi sosial menawarkan pandangan moral dan spiritual dalam membangun keadilan sosial, sosiologi menganalisis dinamika hubungan antarindividu dan kelompok, sementara antropologi menggali nilai-nilai budaya yang dapat menjadi perekat sosial. Dengan mengintegrasikan ketiga disiplin ini, harmoni sosial dapat dibangun secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu strategi implementasi pendekatan integratif adalah melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama dan budaya (Herdiana et al., 2021). Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir dan sikap individu terhadap keberagaman. Dengan memasukkan nilai-nilai kasih, toleransi, dan gotong royong ke dalam kurikulum pendidikan, generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Selain di sekolah, pendidikan karakter diperkuat melalui lembaga keagamaan dan komunitas budaya yang secara aktif mengajarkan pentingnya harmoni sosial. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya memahami keberagaman secara teoritis, tetapi mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain pendidikan, mendorong partisipasi masyarakat dalam dialog sosial menjadi langkah penting dalam membangun kohesi sosial. Dialog yang terbuka antara kelompok-kelompok yang berbeda dapat mengurangi prasangka dan stereotip yang sering menjadi akar konflik sosial (Marbun, 2023). Forum-forum diskusi lintas agama dan budaya, kegiatan gotong royong, serta pertemuan komunitas dapat menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk berdialog dan berbagi pengalaman, mereka akan lebih mudah memahami perspektif satu sama lain dan menemukan titik temu dalam perbedaan. Partisipasi aktif dalam dialog sosial mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus dirawat bersama.

Selanjutnya, membangun kebijakan publik yang inklusif dan adil menjadi faktor kunci dalam mewujudkan harmoni sosial yang berkelanjutan (Melati & Asmorowati, 2023).

Pemerintah dan pemangku kebijakan harus memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu, tetapi mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang mendukung kesetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik dapat mengurangi kesenjangan sosial yang berpotensi memicu ketegangan. Selain itu, kebijakan yang menghargai keberagaman budaya dan agama harus didorong untuk memperkuat identitas nasional yang berbasis pada nilai-nilai kebersamaan. Dengan adanya kebijakan yang adil dan inklusif, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan memiliki rasa kepemilikan terhadap negara.

Pendekatan integratif yang mencakup multidisiplin keilmuan, pendidikan karakter, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik yang inklusif merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan harmoni sosial di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, pemuka agama, akademisi, maupun masyarakat sipil. Dengan komitmen bersama untuk membangun kehidupan yang damai dan inklusif, keberagaman yang ada di Indonesia dapat terus menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Oleh karena itu, pendekatan ini harus terus dikembangkan dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial agar dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Strategi integratif yang menggabungkan teologi sosial, nilai-nilai perdamaian, dan kearifan lokal memiliki peran krusial dalam membangun harmoni sosial di Indonesia. Ketiga elemen ini saling melengkapi dalam menciptakan pendekatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada aspek teologis, tetapi juga mempertimbangkan kearifan budaya dan mekanisme sosial yang telah lama berkembang di masyarakat. Analisis terhadap berbagai komunitas menunjukkan bahwa praktik terbaik dalam mengintegrasikan ketiga aspek ini mampu mereduksi potensi konflik, memperkuat kohesi sosial, dan membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan strategi integratif ini oleh pemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal guna memperkuat perdamaian dan memperkokoh harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Adag, R. M. (2024). Perspektif Agama Kristen Terhadap Keadilan Masa Kini Menurut Kitab Matius. *Teologi Injil Dan Pendidikan Agama*, 2 No 3, 70–82.
- Asrul Hamid, Syaipuddin Ritonga, A. M. N. (2024). Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu sebagai Pilar Toleransi Beragama pada Masyarakat Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13 No 1, 132–143.
- Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1 No 1, 51–60.
- Dewantara, J. A., Budimansyah, D., Darmawan, C., Martono, Prasetyo, W. H., & S. (2024). Language, Cultural Sentiments, and Ethnic Conflict: Understanding Verbal Violence and Discrimination in Multi-Ethnic Schools in West Kalimantan, Indonesia. *Journal of Language, Identity and Education*, 1–17.
- Druckman, D., & Wagner, L. (2019). Justice Matters: Peace Negotiations, Stable Agreements, and Durable Peace. *Journal of Conflict Resolution*, 63 No 2, 287–316.
- Durkheim, E. (1918). Emile Durkheim. *The Sociological Review*, 10 No 1, 54.
- Edelfrida Taek, T. N. D. (2024). Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Perdamaian Menurut Pacem In Terris. *Nubuat : Jurnal Pendidikan Agama Kristen Dan Katolik*, 1 No 4, 60–
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3 No 2, 39–46.
- Fathurrohman. (2023). Pembentukan Harmoni Sosial Melalui Implementasi Moderasi Beragama. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 7 No 1, 559–564.
- H.A.R., T. (2000). *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transpormasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.
- Herdiana, Y., Ali, M., Hasanah, A., & Syamsul Arifin, B. (2021). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Budaya. *Rayah Al-Islam*, 5 No 2, 523–541.
- Heron, J. A., & Ranganathan, B. (2022). Catholic Social Teaching, Liberalism, and Economic Justice. *Journal of Moral Theology*, 11 No 12, 126–146.
- Irfan, I. (2020). Pluralisme dan Dialog Antar Umat Beragama. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3 No 2, 56–74.
- Kolibu, D. R. (2023). Teogogy Nationalistic: An Interaction Model of Christian Religious Education in a Multicultural Society in the Digital Era. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15 No 3, 4203–4215.

- Mae H Dawir, Marciano A Waani, R. R. M. (2024). Kesetaraan dan Keadilan: Prinsip Diakonia Berdasarkan Kajian Teologis 2 Korintus 8: 1-15. *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, 7 No 1, 114–134.
- Marbun, S. (2023). Membangun Dunia yang Berani: Menegakkan Keberagaman dan Kemajemukan di Indonesia. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 3 No 1, 20–34.
- McCandless, E., Hollander, R., Lordos, A., & C. study authors. (2018a). *Forging Resilient Social Contracts: A Pathway to Preventing Violent Conflict and Sustaining Peace FULL REPORT A Research and Policy Dialogue Project*. United Nations Development Programme.
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan dari Prespektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, 31 No 3, 257–267.
- Merina, B., & Muhaimin, M. (2023). Kearifan Lokal dan Hukum Adat Suku Dani di Papua. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3 No 1, 35–52.
- Muhamad Zuldin. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2 No 1, 157–183.
- Munir, I. A. (2021). Hermeneutika Sebagai Metode dalam Kajian Kebudayaan. Titian. *Jurnal Ilmu Humaniora*, 5 No 1, 101–116.
- Noiman Derung, T. (2017). Interaksionisme Simbolik dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA-Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2, 118–131.
- Noiman Derung, T. (2019). Gotong Royong dan Indonesia. *Sapa: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4 No 1, 5–13.
- Nur Indri Yani Harahap, Silfia Hanani, Muhamad Iqbal, & A. R. P. (2023). Peran Pendidikan Islam dalam Mempertahankan Integrasi Sosial: Pandangan Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3 No 1, 1–11.
- Pangalila, T., & Rumbay, C. A. (2024). Multicultural Relation Between Religious Communities in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 80 No 1, 1–7.
- Pardede, H., Lumingkewas, M., & Simangunsong, A. (2023). Teologi Keadilan (Mishpat) Dalam Kitab Mikha dan Relevansinya Terhadap Keadilan Sosial bagi Orang Kristen di Indonesia. *EKKLESIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2 No 1, 83–101.
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Sosietas*, 11 No 1, 1–12.

- Radot Maruli T. Sihombing, Nurman S, Junaidi Indrawadi, S. F., & D. (2024a). Martarombo dalam Interaksi Sosial Generasi Muda Suku Batak Toba. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4 No 3, 642–647.
- Rapo, K. (2024). Dinamika Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. *Multidiciplinary Scientifict Journal*, 2 No 12, 1–16.
- Rinawati. (2016). *Teori Konflik Karl Marx*. 1–23.
- Sefen Krisman Gea, G. D. (2024). Beragama yang Humanis: Sebuah Konstruksi Spiritualitas Persaudaraan Antarumat Beragama melalui Refleksi Teologis Surat-surat Paulus. *Jurnal Teologi Gracia Deo*, 7 No 1, 31–43.
- Selasih, N. N., & Sudarsana, I. K. (2018). Education Based on Ethnopedagogy in Maintaining and Conserving the Local Wisdom: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6 No 2, 293–306.
- Tonglo, Y. T., & Tiboyong, F. S. (2024). *Transformasi Spiritual: Membangun Keadilan dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak-Anak dalam Teologi Sosial*. 2 No 3, 193–200.
- Tutu, A. D. (1999). No Future Without Forgiveness. *Double Day*.
- Yuli, R. R., & Pramudiani, D. (2020). Pemaafan Menuju Rekonsiliasi. *Jurnal Psikologi Jambi*, 5 No 1, 37–42.
- Yusuf Faisal Ali. (2017). Upaya Tokoh Agama dalam Mengembangkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama. *Untirta Civic Education Journal*, 2 No 1, 91–112.